



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

I. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU**

KOP INSTANSI

**KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS
TANAH YANG DIIDENTIFIKASI
SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ... (NAMA
PROYEK PSN/NON PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (nama Proyek PSN/non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor...);

2. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara dan Penetapan Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ... (NAMA PROYEK PSN/NON PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (Nama Proyek PSN/Non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas melakukan persiapan yang dituangkan dalam rencana kerja paling sedikit memuat:

- a. agenda dan jadwal pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- b. rencana pendanaan dan pembiayaan operasional pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- c. rencana kebutuhan bahan dan peralatan;
- d. identifikasi permasalahan dan kendala teknis;
- e. alternatif strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala;
- f. perkiraan anggaran bantuan Dana Kerohiman;
- g. rekomendasi daftar Pihak Yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman;

h. rekomendasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- h. rekomendasi mekanisme dan tata cara pemberian bantuan Dana Kerohiman; dan
- i. bentuk dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Instansi yang Memerlukan Tanah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...,

(cap dan tanda tangan)

Nama ...

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...; (menyesuaikan)
3. Pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota... (menyesuaikan);
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...;
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ...;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...;
9. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ... (NAMA PROYEK PSN/NON
PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN ... (NAMA PROYEK PSN/NON PSN)
DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	dst.	dst.	

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...

(cap dan tanda tangan)

Nama ...

II. FORMAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. FORMAT DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN

DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN

NOMOR:

TANGGAL:

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Musnah					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP		a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya		

2. a. Nama . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Musnah					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	a. Nama Badan Hukum b. Jenis kegiatan c. Alamat d. Tanggal pendirian e. Nomor Akta Pendirian f. Nomor Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/Instansi yang Berwenang			a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya		

....., ... (tanggal) ... (bulan) ... (tahun)

Ketua Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Masyarakat atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam rangka Pembangunan ...

tanda tangan

Nama ...
NIP ...

III. FORMAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

III. FORMAT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ...
(NAMA PROYEK PSN/NON PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (nama Proyek PSN/non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara dan Penetapan Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ... (NAMA PROYEK PSN/NON PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
- KESATU : Menetapkan Daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dan Besaran Nilai Bantuan Dana Kerohiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...,

cap dan tanda tangan

NAMA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota ...; (menyesuaikan)
3. Pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (menyesuaikan);
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...;
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ...;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...;
9. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ...
(NAMA PROYEK PSN/NON PSN) DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ...
KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...

DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN
DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
DAN BESARAN NILAI BANTUAN DANA KEROHIMAN

No. Urut	Pihak yang Berhak	Tanah Musnah					NOP	Nama Wajib Pajak SPPT	NJOP BUMI	NJOP/m ²	Nilai Kerohiman	Keterangan
		NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No. Urut	Pihak yang Berhak	Tanah Musnah					NOP	Nama Wajib Pajak SPPT	NJOP BUMI	NJOP/m ²	Nilai Kerohiman	Keterangan
		NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	a. Nama Badan Hukum b. Jenis kegiatan, c. Alamat, d. Tanggal pendirian, e. Nomor Akta Pendirian f. Nomor Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/Instansi yang Berwenang		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya							

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...

cap dan tanda tangan

NAMA

IV. FORMAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

IV. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN DANA KEROHIMAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA

PEMBERIAN BANTUAN DANA KEROHIMAN DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG
DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH UNTUK PEMBANGUNAN ... (NAMA PROYEK PSN/NON PSN)
DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (dd/mm/yy), telah dilaksanakan pemberian bantuan Dana Kerohiman kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... Tanggal ... tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (Nama Proyek PSN/Non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak Yang Berhak	No. Urut Daftar Pihak Yang Berhak Berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Wali Kota	NIB	Nilai Bantuan Dana Kerohiman (Rp)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Dana Kerohiman Dalam Bentuk Uang	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst.						

2. Desa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak Yang Berhak	No. Urut Daftar Pihak Yang Berhak Berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Wali Kota	NIB	Nilai Bantuan Dana Kerohiman (Rp)	No./Tgl Kuitansi/Tanda Terima Penyerahan Dana Kerohiman Dalam Bentuk Uang	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst.						

Demikian berita acara pemberian bantuan dana kerohiman ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Terpadu
Ketua,

cap dan tanda tangan

Nama ...
NIP ...

Instansi yang Memerlukan Tanah

cap dan tanda tangan

Nama ...
NIP ...

V. FORMAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

V. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PERUBAHAN DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN
DI DESA/KELURAHAN ... KECAMATAN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (dd/mm/yy), telah dilaksanakan perubahan Daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (Nama Proyek PSN/Non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan perubahan sebagai berikut:

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Yang Diidentifikasi					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP		a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya		

2. a. Nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Yang Diidentifikasi					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	a. Nama Badan Hukum b. Jenis kegiatan c. Alamat d. Tanggal pendirian e. Nomor Akta Pendirian f. Nomor Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/Instansi yang Berwenang			a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/ girik/ letter c/ akta jual beli/ lainnya		

Demikian Berita Acara Perubahan Daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Terpadu
Ketua,
cap dan tanda tangan
Nama ...
NIP ...

VI. FORMAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

VI. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN ATAS DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENOLAKAN KEBERATAN ATAS DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN DANA KEROHIMAN
NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (dd/mm/yy), telah dilaksanakan penolakan keberatan atas Daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan ... (Nama Proyek PSN/Non PSN) di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Diidentifikasi Musnah					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP	a. Nama b. Tanggal lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No.KTP		a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/girik/letter c/akta jual beli/lainnya		

2. a. Nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No. Urut	Pihak yang Berhak		Tanah Diidentifikasi Musnah					Keterangan
	Pemilik	Menguasai	NIB	Letak	Status	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	a. Nama Badan Hukum b. Jenis kegiatan c. Alamat d. Tanggal pendirian e. Nomor Akta Pendirian f. Nomor Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/Instansi yang Berwenang			a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan	Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Tanah dengan Alat Bukti Tertulis Hak Lama	sertipikat/girik/letter c/akta jual beli/lainnya		

Penolakan keberatan dilakukan berdasarkan verifikasi, telaah, dan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Demikian Berita Acara Penolakan atas Daftar Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Terpadu
Ketua,
cap dan tanda tangan
Nama ...
NIP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman